Kybernology **ISSN 3031-1063**
Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
Volume 4 Nomor 1, Juni 2026
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology

STAKEHOLDER MAPPING PENERAPAN SISTEM INFORMASI PANGAN (SIDAPANG) DI KABUPATEN PANDEGLANG

Khaila Syasya Nabila
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia
e-mail: khaila.syasya@gmail.com

ABSTRACT

The Food Data Information System (SIDAPANG) is a digital platform developed to collect, manage, and provide integrated food data in Pandeglang Regency. However, its implementation still faces several challenges, including limited system accessibility, data inconsistencies, and the uneven distribution of agricultural processing facilities. This study aims to analyze stakeholder mapping in the implementation of SIDAPANG for collecting agricultural commodity data in Pandeglang Regency. A descriptive qualitative approach was employed using the value orientation mapping model proposed by Kennon et al. (2009), which consists of stakeholder identification, analysis, mapping, and prioritization. The findings reveal that SIDAPANG involves various stakeholders, including the Department of Agriculture and Food Security (DPKP), Agricultural Extension Officers (PPL), Diskomsantik, Bappeda, BPS, Diskoperindag, Bulog, village governments, RMUs, farmer groups, farmers, and the community. Among them, DPKP and PPL are the most influential stakeholders due to their high levels of contribution, influence, and involvement in system implementation. The study also found that SIDAPANG has not yet been fully optimized because of technical system constraints, delays in data updates, and limited stakeholder data integration. Therefore, strengthening stakeholder coordination, improving data integration, and optimizing system development are necessary to enhance the effectiveness of SIDAPANG in supporting food security in Pandeglang Regency.

Keywords: *Stakeholder mapping, SIDAPANG, Food Security, Agricultural Data*

ABSTRAK

Sistem Informasi Data Pangan (SIDAPANG) merupakan sistem informasi berbasis digital yang digunakan untuk menghimpun, mengelola, dan menyajikan data pangan di Kabupaten Pandeglang. Namun, dalam penerapannya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan stakeholder dalam mengakses sistem, masih ditemukannya ketidaksesuaian data, serta belum meratanya sarana pengolahan hasil pertanian/RMU di kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stakeholder mapping pada penerapan SIDAPANG dalam menghimpun data komoditas pertanian di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan yaitu value orientation mapping oleh Kennon et al., (2009), yang terdiri dari empat indikator, yaitu identifikasi, analisis, pemetaan, dan menentukan prioritas. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIDAPANG melibatkan berbagai stakeholder dari unsur pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat, seperti DPKP Pandeglang, penyuluh pertanian lapangan, Diskomsantik, Bappeda, BPS, Diskoperindag, Bulog, pemerintah desa, RMU, gapoktan, petani, dan masyarakat. DPKP Pandeglang beserta penyuluh pertanian menjadi stakeholder yang paling dominan karena memiliki tingkat kontribusi, pengaruh, dan keterlibatan paling besar dalam penerapan SIDAPANG. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIDAPANG masih belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala teknis sistem, keterlambatan pembaruan data, serta keterbatasan integrasi data antar stakeholder. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem yang lebih optimal, peningkatan koordinasi antar stakeholder, penguatan integrasi data, serta sosialisasi yang lebih luas agar SIDAPANG dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang.

Kata Kunci: *Stakeholder mapping, SIDAPANG, Ketahanan Pangan, Data Pertanian*

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara hingga perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau.

Oleh karena itu, penyelenggaraan ketahanan pangan memerlukan dukungan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar pada sektor pertanian yang berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional sekaligus menjamin ketersediaan pangan masyarakat (Almubaroq & Trenggono, 2025).

Sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan tertinggi pada triwulan I tahun 2025 sebesar 10,52 persen dan kembali mengalami pertumbuhan sebesar 13,53 persen pada triwulan II tahun 2025 (BPS Indonesia, 2025a; BPS Indonesia, 2025b). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu komoditas utama yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional adalah padi, yang hingga saat ini masih menjadi sumber

pangan pokok mayoritas masyarakat Indonesia.

Di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah dengan potensi pertanian yang sangat besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang menempati posisi pertama sebagai wilayah dengan luas panen padi terbesar di Provinsi Banten, yaitu mencapai 47.044 hektar pada periode Februari hingga April 2025 (BPS Provinsi Banten, 2025). Selain itu, Kabupaten Pandeglang juga memiliki lahan pertanian padi seluas 52.640 hektar yang tersebar di 35 kecamatan (Fachreinsyah, 2024). Besarnya potensi tersebut menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai wilayah strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor pertanian dan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang mendorong transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2022. Salah satu implementasinya diwujudkan melalui Sistem Informasi Data Pangan (SIDAPANG) yang diluncurkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023. SIDAPANG dikembangkan sebagai sistem informasi yang menyediakan data pangan secara akurat, mutakhir, real time, dan terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengawasan sektor pangan daerah (Tuxedovation, 2025).

SIDAPANG menyediakan berbagai informasi yang mencakup data produksi padi, luas lahan pertanian, sarana pengolahan hasil pertanian, distribusi beras, ketersediaan stok, hingga konsumsi beras. Dalam pelaksanaannya, sistem ini melibatkan berbagai *stakeholder* dengan peran dan kewenangan yang berbeda, mulai dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi Informatika, Sandi, dan Statistik (Diskomsantik), Dinas Koperasi, UMKM, Industri, dan Perdagangan (Diskoperindag), Perum Bulog, pemerintah kecamatan, pelaku usaha Rice Milling Unit (RMU), hingga petani dan kelompok tani. Keterlibatan berbagai *stakeholder* tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIDAPANG tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat koordinasi, kolaborasi, serta keterlibatan para pemangku kepentingan yang terlibat (Astuti et al., 2023).

Meskipun demikian, implementasi SIDAPANG masih menghadapi sejumlah permasalahan. Pertama, akses terhadap sistem masih terbatas sehingga belum dapat

dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh *stakeholder* yang berkepentingan. Hasil observasi menunjukkan bahwa laman SIDAPANG tidak dapat diakses sebagaimana mestinya karena mengalami kendala teknis. Kedua, ditemukan adanya ketidaksesuaian data antara SIDAPANG dengan sumber data lain terkait keberadaan Rice Milling Unit (RMU) di Kabupaten Pandeglang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data yang tersedia belum sepenuhnya terintegrasi dan merepresentasikan kondisi riil di lapangan.

Selanjutnya permasalahan lain yang ditemukan yakni, terdapat ketidaksesuaian antara wilayah dengan tingkat produksi padi tinggi dan ketersediaan sarana pengolahan hasil pertanian. Beberapa kecamatan dengan produksi padi tertinggi justru belum didukung oleh fasilitas RMU yang memadai. Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan data yang telah dihimpun melalui SIDAPANG belum berjalan secara optimal.

Dalam perspektif administrasi publik, keterlibatan *stakeholder* merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu program maupun kebijakan publik. Paradigma collaborative governance menekankan pentingnya sinergi dan partisipasi berbagai pihak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama (Afni, 2022). *Stakeholder* merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh pelaksanaan suatu program atau kebijakan (Alfarisi & Handrian, 2025). Oleh karena itu, pemetaan *stakeholder* menjadi penting untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan, pengaruh, serta peran masing-masing pihak dalam mendukung implementasi SIDAPANG.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasan et al. (2025) menunjukkan bahwa keberlanjutan sistem pertanian dipengaruhi oleh pembagian peran *stakeholder* yang melibatkan pemerintah, petani, sektor swasta, media, dan akademisi. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa hubungan antar *stakeholder* memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program berbasis pertanian.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada keberlanjutan usaha tani dan pengelolaan sektor pertanian secara umum. Penelitian mengenai *stakeholder mapping* dalam implementasi sistem informasi pangan berbasis digital di tingkat daerah masih relatif terbatas, khususnya pada Sistem Informasi Data Pangan (SIDAPANG) Kabupaten Pandeglang. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis *stakeholder mapping* dalam penerapan Sistem Informasi Data Pangan (SIDAPANG) dalam menghimpun data

komoditas pertanian di Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *stakeholder mapping* dalam penerapan Sistem Informasi Data Pangan (SIDAPANG) dalam menghimpun data komoditas pertanian di Kabupaten Pandeglang.

KAJIAN PUSTAKA

Administrasi publik merupakan proses pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor pemerintah maupun nonpemerintah untuk mencapai tujuan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Pasolong, 2019). Dalam perkembangannya, administrasi publik tidak hanya berfokus pada aspek birokrasi, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami hubungan antar aktor dalam suatu kebijakan adalah teori *stakeholder*.

Stakeholder merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi atau kebijakan (Freeman, 1984). Dalam konteks kebijakan publik, *stakeholder* memiliki tingkat kepentingan, pengaruh, dan keterlibatan yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan pemetaan untuk mengetahui posisi serta kontribusinya terhadap suatu program. *Stakeholder mapping* merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelompokkan *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan, pengaruh, serta peran yang dimiliki dalam suatu kebijakan atau program (Kustriani, 2015).

Penelitian ini menggunakan model *value orientation mapping* yang dikembangkan oleh Kennon et al. (2009). Model ini terdiri atas empat tahapan utama, yaitu identifikasi *stakeholder*, analisis *stakeholder*, pemetaan *stakeholder*, dan penentuan prioritas *stakeholder*. Analisis dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu contribution, legitimacy, *willingness* to engage, influence, dan necessity of involvement. Selanjutnya, hasil analisis divisualisasikan melalui pemetaan *stakeholder* berdasarkan tingkat *expertise* dan *willingness* untuk mengetahui posisi strategis masing-masing *stakeholder* dalam mendukung implementasi suatu program atau kebijakan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan *stakeholder* menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program berbasis pertanian maupun pembangunan daerah. Hasan et al. (2025) menemukan bahwa keberlanjutan sistem pertanian dipengaruhi oleh pembagian peran *stakeholder* yang melibatkan pemerintah, petani, sektor swasta, media, dan akademisi. Namun demikian, penelitian mengenai

stakeholder mapping dalam implementasi sistem informasi pangan berbasis digital di tingkat daerah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis *stakeholder mapping* pada penerapan Sistem Informasi Data Pangan (SIDAPANG) dalam menghimpun data komoditas pertanian di Kabupaten Pandeglang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis *stakeholder mapping* dalam penerapan Sistem Informasi Data Pangan (SIDAPANG) dalam menghimpun data komoditas pertanian di Kabupaten Pandeglang. Penelitian dilaksanakan pada instansi dan *stakeholder* yang terlibat dalam penerapan SIDAPANG, meliputi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Diskomsantik, Bappeda, BPS, Diskoperindag, Bulog, pemerintah desa, pelaku usaha Rice Milling Unit (RMU), petani, dan masyarakat. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan mereka dalam penerapan SIDAPANG.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model *value orientation mapping* dari Kennon et al. (2009) yang meliputi identifikasi *stakeholder*, analisis *stakeholder*, pemetaan *stakeholder*, dan penentuan prioritas *stakeholder*. Data dianalisis menggunakan tahapan analisis kualitatif menurut Creswell (2018), yaitu mengorganisasi data, membaca keseluruhan data, melakukan coding, mengembangkan tema, menyajikan hasil, dan melakukan interpretasi data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Data Pangan Kabupaten Pandeglang (SIDAPANG) merupakan sistem informasi berbasis digital yang dirancang untuk menghimpun, mengelola, dan menyajikan data pangan secara terintegrasi hingga tingkat desa. Kehadiran SIDAPANG dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah daerah terhadap ketersediaan data pangan yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses sebagai dasar dalam perencanaan serta pengambilan kebijakan di bidang ketahanan pangan.

Selain itu, SIDAPANG diharapkan dapat mendukung penyediaan data sarana pendukung pertanian, kemitraan bisnis, dan produk pertanian yang terstandarisasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai *stakeholder* dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan

ketahanan pangan daerah. Dalam implementasinya, SIDAPANG melibatkan berbagai *stakeholder* yang memiliki peran, kepentingan, pengaruh, dan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan SIDAPANG tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi, kontribusi, dan dukungan antar *stakeholder* yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan teori *value orientation mapping* yang dikemukakan oleh Kennon et al. (2009) untuk menganalisis dan memetakan *stakeholder* berdasarkan nilai, kontribusi, tingkat pengaruh, kemauan untuk terlibat, serta posisi strategisnya dalam mendukung implementasi suatu program. Model ini terdiri atas empat tahapan utama, yaitu identifikasi *stakeholder*, analisis *stakeholder*, pemetaan *stakeholder*, dan penentuan prioritas *stakeholder*. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memahami keterlibatan *stakeholder* dalam penerapan SIDAPANG pada proses penghimpunan data komoditas pertanian di Kabupaten Pandeglang.

1. Identifikasi

Tahap identifikasi bertujuan untuk mengidentifikasi individu, kelompok, maupun organisasi yang memiliki keterkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Data Pangan (SIDAPANG) di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SIDAPANG melibatkan berbagai *stakeholder* yang terdiri atas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Diskomsantik, Bappeda, BPS, Diskoperindag, Bulog, pemerintah desa, RMU/Gapoktan, petani, dan masyarakat.

Masing-masing *stakeholder* memiliki peran dan keterlibatan yang berbeda dalam mendukung penghimpunan data komoditas pertanian. DPKP menjadi *stakeholder* utama karena memiliki kewenangan dalam pengelolaan sistem dan penghimpunan data pertanian daerah, sedangkan PPL menjadi aktor yang paling relevan karena terlibat langsung dalam proses penginputan dan pembaruan data di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan SIDAPANG tidak hanya melibatkan organisasi formal, tetapi juga aktor lapangan yang memiliki keterkaitan langsung terhadap proses penghimpunan data pertanian.

2. Analisis

Analisis *stakeholder* dilakukan berdasarkan aspek *contribution, legitimacy, willingness to engage, influence*, dan *necessity of involvement.* Hasil analisis *stakeholder* pada penerapan SIDAPANG dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. *Stakeholder mapping Analysis*

Stakeholder	*Expertise*		*Will*	*Value*	
	Cont	*Leg*	*Will*	*Infl*	*Nesc*
DPKP	*H*	*H*	*H*	*H*	*H*
Penyuluh	*H*	*H*	*H*	*H*	*H*
Diskomsantik	*H*	*M*	*H*	*M*	*M*
Bappeda	*M*	*M*	*M*	*M*	*M*
BPS	*M*	*M*	*M*	*L*	*M*
Bulog	*H*	*M*	*H*	*M*	*H*
Diskoperindag	*M*	*M*	*H*	*M*	*H*
Pemdes	*M*	*M*	*M*	*L*	*M*
RMU/ Gapoktan	*M*	*M*	*M*	*M*	*M*
Petani	*L*	*L*	*M*	*L*	*M*
Masyarakat	*L*	*L*	*L*	*L*	*L*

Ket: H = High; M = Medium; L = Low

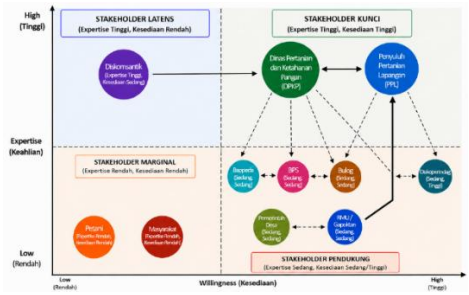
Berdasarkan Tabel 1, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) merupakan *stakeholder* yang memiliki tingkat *contribution, legitimacy, willingness to engage, influence, dan necessity of involvement* tertinggi dalam penerapan SIDAPANG. DPKP berperan sebagai pengelola utama sistem, sedangkan PPL menjadi aktor lapangan yang bertanggung jawab dalam proses penghimpunan dan pembaruan data pertanian.

Selain itu, Diskomsantik, Bulog, Diskoperindag, Bappeda, BPS, pemerintah desa, dan pemilik RMU/Gapoktan juga memiliki posisi penting sebagai *stakeholder* pendukung. Diskomsantik berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur digital dan pemeliharaan sistem. Bappeda memanfaatkan data SIDAPANG sebagai bahan perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah, sedangkan BPS menggunakan data tersebut sebagai informasi pendukung dalam penyediaan statistik sektoral. Pemerintah desa berperan dalam mendukung penyampaian informasi dan koordinasi data di tingkat lokal, sementara pemilik RMU/Gapoktan berkontribusi sebagai penyedia informasi terkait produksi dan pengolahan hasil pertanian.

Bulog memanfaatkan data untuk mendukung penyerapan gabah dan stabilisasi pangan, sedangkan Diskoperindag memanfaatkan data pangan dalam pemantauan harga dan pengendalian inflasi daerah. Sementara itu, petani dan masyarakat memiliki tingkat *influence* yang relatif rendah karena lebih berperan sebagai penerima manfaat dibandingkan pengambil keputusan dalam implementasi SIDAPANG.

3. Pemetaan

Pemetaan *stakeholder* dilakukan menggunakan model *value orientation mapping* yang dikembangkan oleh Kennon et al. (2009) dengan mempertimbangkan tingkat *expertise* dan *willingness* masing-masing *stakeholder*. Hasil pemetaan *stakeholder* ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pemetaan Aktor menggunakan *Value orientation mapping*

Berdasarkan hasil pemetaan, DPKP dan PPL berada pada kategori *stakeholder* kunci karena memiliki tingkat *expertise* dan *willingness* yang tinggi. Diskomsantik berada pada kategori *stakeholder latens* dengan tingkat *expertise* tinggi dan *willingness* sedang. Diskoperindag berada pada kategori *stakeholder* pendukung dengan tingkat *expertise* sedang dan *willingness* tinggi. Selanjutnya, Bappeda, BPS, Bulog, pemerintah desa, serta RMU/Gapoktan berada pada kategori *stakeholder* pendukung dengan tingkat *expertise* dan *willingness* yang relatif sedang. Adapun petani dan masyarakat berada pada kategori *stakeholder* marginal karena memiliki tingkat *expertise* dan *willingness* yang relatif rendah. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIDAPANG sangat dipengaruhi oleh DPKP dan PPL sebagai *stakeholder* yang memiliki keahlian dan kesediaan terlibat paling tinggi.

4. Menentukkan Prioritas

Tahap penentuan prioritas dilakukan untuk mengidentifikasi isu utama serta *stakeholder* yang perlu diprioritaskan dalam penerapan SIDAPANG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pengembangan sistem, kendala teknis aplikasi, keterlambatan penginputan data, keterbatasan anggaran *maintenance*, serta tingginya ketergantungan terhadap penyuluh pertanian dalam proses pembaruan data. Selain itu, *stakeholder* juga menyoroti pentingnya integrasi data antar instansi, peningkatan akurasi data pertanian, serta pengembangan SIDAPANG agar dapat memuat lebih banyak komoditas pangan selain beras.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan pemanfaatan SIDAPANG oleh masyarakat masih belum optimal karena masih banyak petani dan masyarakat yang belum mengetahui keberadaan maupun fungsi sistem tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang serta Penyuluh Pertanian Lapangan menjadi *stakeholder* yang paling diprioritaskan karena memiliki pengaruh dan keterlibatan paling besar dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan pembaruan data pertanian pada SIDAPANG.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Sistem Informasi Data Pangan (SIDAPANG) di Kabupaten Pandeglang melibatkan berbagai *stakeholder* dari unsur pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat dengan peran dan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Hasil *stakeholder mapping* menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

(DPKP) serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) merupakan *stakeholder* kunci karena memiliki tingkat *contribution*, *legitimacy*, *willingness to engage*, *influence*, dan *necessity of involvement* yang paling tinggi. Namun, penerapan SIDAPANG masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengembangan sistem, kendala teknis aplikasi, keterlambatan penginputan data, keterbatasan anggaran *maintenance*, serta tingginya ketergantungan terhadap PPL dalam proses pembaruan data. Selain itu, koordinasi dan integrasi data antar *stakeholder* serta pemanfaatan SIDAPANG oleh masyarakat masih belum optimal. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan SIDAPANG memerlukan penguatan koordinasi, integrasi data, dan keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam mendukung pengelolaan data pangan yang akurat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fifth Edit). SAGE Publicantions.

Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik (Cetakan ke-1). ALFABETA.

Kustriani, S. H. W. (2015). Modul Pelatihan Analis Kebijakan. In Pusaka Lembaga Administrasi Negara RI.

Jurnal

Alfarisi, S., & Handrian, E. (2025). *Peran Stakeholder Dalam Pelaksanaan Pada Aplikasi Pekan Kita (PEKA) Di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan*. *2*(1), 78–103.

Astuti, Ratih Widya Retno, S. A., & Rahman, A. Z. (2023). *Stakeholder*s Mapping Pengelolaan Wisata Telaga Menjer Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. *Journal of Public Policy and Management Review*, *1*(12), 563–579.

Hasan, N., Harisudin, M., & Kusnandar. (2025). The Role of *Stakeholder* on Rojolele Srinuk Rice Farming Sustainability: A Mapping *Stakeholder* Approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1490*(1).

HZ Almubaroq, R Trenggono, A. S. (2025). Implementasi bhakti tni manunggal pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka mendukung kesiapan logistik wilayah. *Management, Social, Politic & Defense Journal*, *1*(1), 185–198.

Ika Nur Afni. (2022). *Stakeholder mapping* dalam Pelaksanaan Community Tourism Collaborative Governance (CTCG) di Desa Maron Wonosobo. *Jurnal Litbang*

Provinsi Jawa Tengah, *19*(2), 123–136.

Kennon, N., Howden, P., & Hartley, M. (2009). *Who really matters ? A stakeholder analysis tool*. *5*(2), 9–17.

Dokumen Pemerintah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 400.2.3.5/Kep.353-Huk/2023 tentang Sistem Informasi Data Pangan Kabupaten Pandeglang